

ANALISIS KEBIJAKAN EKONOMI PEMERINTAH DALAM MENGATASI DEFISIT TRANSAKSI BERJALAN

Lisnawati^{*)}



Abstrak

Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia triwulan II-2013, defisit transaksi berjalan mengalami peningkatan menjadi USD9,8 miliar (4,4 persen dari PDB). Defisit transaksi berjalan yang terjadi turut memperparah kondisi perekonomian Indonesia. Pemerintah menanggapi keadaan tersebut dengan mengeluarkan kebijakan. Kebijakan Pemerintah yang diambil berupa pemberian keringanan pajak bagi industri padat karya, industri padat modal dan industri yang berorientasi ekspor; kebijakan penurunan impor migas serta kebijakan penetapan kenaikan pajak penjualan barang mewah. Kebijakan Pemerintah ini dapat memperkecil defisit transaksi berjalan pada triwulan selanjutnya apabila dapat diimplementasikan, dikoordinasikan serta adanya komitmen yang kuat dari pihak yang berkepentingan.

A. Pendahuluan

Pelemahan nilai tukar yang terjadi akhir-akhir ini mengkhawatirkan berbagai kalangan masyarakat. Pelemahan nilai tukar dinilai karena meningkatnya defisit transaksi berjalan yang mencapai 4,4 persen pada semester II-2013. Defisit transaksi berjalan yang begitu tinggi dapat membahayakan perekonomian Indonesia. Antisipasi perlu dilakukan Pemerintah agar defisit transaksi berjalan pada triwulan berikutnya tidak melebar seperti pada kuartal II-2013.

Berdasarkan Laporan Neraca Pembayaran Indonesia triwulan II-2013, perekonomian

Indonesia masih mengalami tekanan yang tercermin pada defisit transaksi berjalan yang meningkat dari USD5,8 miliar (2,6 persen dari PDB) menjadi USD9,8 miliar (4,4 persen dari PDB). Tekanan defisit transaksi berjalan yang semakin besar dipicu dari melemahnya kinerja neraca perdagangan seiring menipisnya surplus neraca perdagangan nonmigas.

Surplus neraca perdagangan nonmigas menyusut karena impor, khususnya impor bahan baku dan barang konsumsi yang meningkat seiring naiknya kebutuhan domestik menjelang puasa dan lebaran. Di sisi lain, perbaikan kinerja ekspor nonmigas tertahan oleh harga komoditas di pasar

^{*)} Peneliti bidang Ekonomi Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: lisnawati@dpr.go.id dan lisnawati.dpr@gmail.com.



internasional yang masih cenderung menurun akibat perekonomian China dan India yang melambat. Sementara itu, defisit neraca perdagangan migas masih lebih besar dari surplus neraca perdagangan nonmigas sehingga secara keseluruhan neraca perdagangan barang mengalami defisit.

B. Reaksi Pemerintah Mengatasi Defisit Transaksi Berjalan

Pada hari Jumat, 23 Agustus 2013 dalam jumpa pers di Istana Negara, Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Rajasa mengumumkan empat paket kebijakan ekonomi yang diambil Pemerintah. Di antaranya paket untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah, Paket untuk menjaga pertumbuhan ekonomi, Paket untuk menjaga daya beli, dan Paket untuk mempercepat investasi.

Dalam paket yang dibuat untuk memperbaiki defisit transaksi berjalan dan nilai tukar rupiah terhadap dolar, hal yang akan dilakukan Pemerintah adalah mendorong ekspor dan memberikan keringanan pajak kepada industri yang padat karya, padat modal, dan 30 persen hasil produksinya berorientasi ekspor. Lalu pemerintah juga akan menurunkan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor. Kemudian pemerintah akan menetapkan pajak penjualan barang mewah lebih tinggi untuk mobil *Completely Built Up* (CBU) dan barang-barang impor bermerek dari rata-rata 75 persen menjadi 125 persen hingga 150 persen.

C. Kebijakan Pemberian Keringanan Pajak bagi Industri Padat Karya, Industri Padat Modal, dan Industri yang Berorientasi Ekspor

Menurut Menteri Perindustrian, M.S Hidayat defisit neraca transaksi berjalan saat ini banyak disumbang oleh industri. Penyebabnya,

pabrik-pabrik di Indonesia banyak mengimpor barang modal dan bahan penolong. Struktur industri yang lemah terjadi saat ini merupakan peninggalan Orde Baru yang tak pernah mengupayakan terjadinya hilirisasi. Kondisi industri sekarang sangat rapuh, terutama jika ada pengaruh eksternal seperti pelemahan nilai tukar karena banyak sektor bergantung pada impor barang modal. Struktur industri sekarang secara fundamental belum kuat, dengan konsep hilirisasi diharapkan dapat memperkuat struktur industri Indonesia sehingga impor tidak lagi terdiri dari *capital goods* dan defisit transaksi berjalan bisa dikompensasikan,

Saat ini, tidak ada jalan lain mengatasi defisit neraca berjalan, kecuali memperbanyak penanaman modal asing pada industri yang berorientasi ekspor dan memberikan keringanan pajak bagi industri padat karya dan padat modal. Pemerintah telah memastikan akan memberikan insentif bagi industri tersebut berupa pengurangan Pajak Penghasilan (PPH) badan. Kebijakan ini ditujukan agar perusahaan tidak terbebani dan bisa tetap menjalankan aktivitas bisnisnya di tengah gejolak ekonomi nasional sehingga mencegah perusahaan melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Percepatan realisasi kebijakan pemerintah terhadap keringanan pajak untuk industri akan membuat defisit neraca berjalan lebih baik dan akan efektif dalam jangka panjang.

D. Kebijakan Penurunan Impor Migas

Dalam mengatasi defisit transaksi berjalan Pemerintah berencana menurunkan impor migas. Berdasarkan data Bank Indonesia impor minyak triwulan II-2013 mencapai USD9,5 miliar, turun 10,8 persen dibandingkan triwulan sebelumnya. Penurunan ini didorong oleh berkurangnya impor produk minyak, baik karena penurunan volume maupun harga. Sementara itu, nilai impor minyak mentah lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya akibat turunnya harga, meski secara volume meningkat seiring

partumbuhan volume konsumsi BBM yang cenderung melebihi kuota.

Penggunaan solar impor untuk BBM subsidi yang setiap tahun mencapai 17,5 juta kiloliter, dan solar impor untuk konsumsi mencapai 17,5 juta hingga 18 juta kiloliter, jika ditotal kurang lebih mencapai 35 juta kiloliter solar yang diimpor. Oleh karena itu penurunan impor migas dengan memperbesar biodiesel dalam solar untuk mengurangi konsumsi solar yang berasal dari impor merupakan solusi yang tepat untuk mengatasi defisit transaksi berjalan dalam waktu singkat meskipun hal ini kurang begitu efektif karena kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) Indonesia sekitar 1,4 juta kiloliter. Sedang produksi minyak mentah nasional hanya 840.000 barel per hari. Pemerintah harus mengantisipasi kebutuhan BBM yang terus tumbuh dengan jalan menggunakan energi alternatif sehingga dapat mengurangi nilai impor dan menghemat konsumsi BBM.

E. Kebijakan Penetapan Kenaikan Pajak Penjualan Barang Mewah

Pemberian kenaikan pajak penjualan barang mewah (PPnBM) seperti mobil-mobil mewah sebesar 150 persen telah ditetapkan pemerintah. Ini diterapkan sebagai langkah menggenjot penerimaan negara dari sektor pajak serta mengurangi defisit transaksi berjalan karena impor. Aturan tersebut diperkuat dengan adanya Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah ditandatangani Menteri Keuangan Chatib Basri.

Menurut Menteri Keuangan Chatib Basri mobil diimpor utuh/CBU akan dikenakan pajak 125-150 persen yang sebelumnya mobil-mobil mewah tersebut hanya dikenakan pajak sebesar 75 persen. Kebijakan kenaikan PPnBM ini tidak akan berdampak signifikan ke sektor lainnya karena peningkatan pajak dikenakan untuk barang konsumsi. Khusus bagi barang yang sudah tidak dikategorikan lagi sebagai barang mewah dan bisa diproduksi di dalam negeri, Pemerintah hendaknya menerapkan

kebijakan penghapusan PPnBM agar kebijakan ini lebih efektif untuk memperkecil defisit transaksi berjalan triwulan berikutnya.

F. Penutup

Ketergantungan Indonesia terhadap produk-produk impor, terutama bahan baku industri telah memperparah permasalahan ekonomi nasional. Sektor industri belum kokoh dan mandiri dalam berbagai bidang strategis. Akibatnya ketika krisis seperti sekarang banyak industri yang akan terpuruk dan terpaksa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama industri atau perusahaan yang bahan bakunya berbasis impor. Peningkatan impor dan minimnya ekspor itu terlihat dari defisit neraca transaksi berjalan.

Bagaimanapun kunci keberhasilan dari paket kebijakan ekonomi tersebut terletak pada implementasinya di lapangan. Sebagus apa pun paket kebijakan yang dikeluarkan, kalau tidak diimbangi implementasi yang baik, koordinasi serta komitmen kuat tidak akan berdampak terhadap penguatan struktur ekonomi Indonesia.

Pemerintah boleh optimistis tekanan ekonomi global yang menyebabkan terpuruknya nilai tukar rupiah yang diakibatkan defisit transaksi berjalan bisa diatasi lewat paket kebijaksanaan ekonomi tersebut. Namun demikian, implementasi dari paket kebijakan itu harus tetap dikawal dengan baik oleh DPR RI agar berjalan efektif.

Rujukan:

1. "Laporan Neraca Pembayaran Indonesia, Realisasi Triwulan II-2013," <http://www.bi.go.id/NR/ronlyres/0AF44705-EA06-42EE-9F2E-3A14AF2E0D0B/29784>, diakses 16 Agustus 2013.
2. "Menperin: Defisit transaksi berjalan baru pulih 4 tahun lagi," <http://www.merdeka.com/uang>, diakses 20 Agustus 2013.
3. "4 Paket Lengkap Kebijakan Ekonomi Pemerintah," <http://bisnis.liputan6.com/read/672922>, diakses 23 Agustus 2013.

4. "Paket Kebijakan Stabilisasi Ekonomi, Seberapa Efektif?" <http://bisnis.news.viva.co.id/news/read/438756>, diakses 25 Agustus 2013.
5. "HT: Empat paket kebijakan Pemerintah tidak efektif," <http://ekbis.sindonews.com/read/2013/08/25/33/775237>, diakses 25 Agustus 2013.
6. "Aturan baru terbit, pajak mobil mewah menjadi 150 persen," <http://www.merdeka.com/uang>, diakses 26 Agustus 2013.
7. "Pemerintah Optimis Paket Kebijakan Perbaiki Neraca Transaksi Berjalan," <http://www.republika.co.id/berita/ekonomi/makro/13/08/26>, diakses 26 Agustus 2013.